

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Danim 2012, hlm. 6).

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi bagi keberhasilan suatu organisasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi yang berada di lembaga pendidikan formal yang merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 bahwa: (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Wahjosumidjo (2008, hlm. 83) mendefinisikan bahwa “Kepala Sekolah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.”

Menurut Maris, dkk. (2016) menjelaskan bahwa Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu lulusan, yang mampu menunjukkan daya juang dan sifat kompetitifnya dalam persaingan global.

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat penting karena dapat mempengaruhi berhasil dan tidaknya mutu pendidikan itu sendiri. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006) terdapat tujuh

peran utama kepala sekolah, yaitu sebagai; *educator* (pendidik); manajer; administrator; *supervisor* (penyelia); *leader* (pemimpin); pencipta iklim kerja; dan wirausahawan;

Minnah dkk. (dalam Ismail, 2018 hlm.4) mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sebagai penggerak motor perubahan mempunyai peranan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga harus memiliki kemampuan sebagai leader. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik idealnya mampu mengelola semua sumber daya pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan baik dari sisi pembelajaran maupun pengembangan sumber daya manusia. Proses mempengaruhi akan tercapai manakala personal sekolah melakukan kerjasama secara sinergi sebagai sebuah sistem yang kokoh untuk menguatkan kondisi lingkungan internal sekolah sehingga dapat bersinergi dengan pihak eksternal. Kepala sekolah berperan untuk menganalisa secara tepat berbagai kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sekolah, sehingga bisa melahirkan strategi yang tepat untuk membawa sekolah yang diharapkan.

Dengan demikian kepala sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam manajemen sekolah, kepala sekolah merupakan *top leader* untuk menentukan arah kebijakan menuju kepada keberhasilan sekolah.

Strategi kepemimpinan adalah suatu tipe atau gaya yang digunakan oleh seorang pemimpin yang dilakukan untuk mempengaruhi kegiatan orang lain agar sasaran organisasi tercapai. Saat ini terdapat banyak strategi untuk mempengaruhi atau mengarahkan sumber daya manusia dalam organisasi, salah satunya melalui perilaku edifikasi. Edifikasi berasal dari kata *edify* yang berarti memajukan pendidikan, edifikasi juga mengandung arti bahwa seorang pemimpin mendidik atau memberikan pelajaran kepada anggotanya untuk meningkatkan kualitas anggota agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kegiatan edifikasi harus dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan bahkan karakter. Kebiasaan ini dapat pula membentuk budaya organisasi, sehingga terciptanya budaya untuk mengembangkan organisasi.

Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah

kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010). Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu (Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan menengah kejuruan melaksanakan pendidikan melalui program keahlian tertentu yang telah disesuaikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Melalui program keahlian tertentu, diharapkan SMK dapat menghasilkan lulusan yang produktif dan dapat bersaing dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sub sistem pendidikan nasional yang bertanggungjawab dalam penyiapan SDM tingkat menengah yang handal, berorientasi kepada kebutuhan pasar harus mampu mengembangkan inovasi untuk mempengaruhi perubahan kebutuhan pasar sehingga dapat mewujudkan kepuasan pencari kerja.

Saat ini kita sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai dimensi kehidupan. Telah banyak terjadi lembaga besar yang berjatuh digantikan dengan munculnya lembaga-lembaga baru yang lebih inovatif dan kompetitif. Tidak terkecuali lembaga pendidikan saat ini juga menghadapi tantangan yang tidak mudah, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0 SMK harus terus berkembang secara dinamis dan mampu menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi, diperlukan komitmen yang tinggi agar SMK mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia sebagai tenaga kerja produktif dan profesional yang diakui secara nasional dan internasional. Banyak bidang pekerjaan yang selama ini diisi tenaga manusia hilang digantikan

dengan teknologi, mesin, robot, ataupun kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*. Akibatnya banyak lulusan SMK yang seharusnya dapat langsung bekerja akhirnya terancam menjadi pengangguran.

Adapun beragam upaya peningkatan kualitas SMK telah tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Upaya yang dimaksud diantaranya pembuatan peta jalan pengembangan SMK, pengembangan dan penyesuaian kurikulum. Selain itu, inovasi pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga pendidik, kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri maupun perguruan tinggi, peningkatan akses sertifikasi lulusan dan akreditasi SMK, serta pembentukan kelompok kerja pengembangan SMK.

Tingkat pengangguran pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat paling tinggi diantara lulusan jenjang pendidikan lainnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Periode 2014-2019 Muhadjir Effendy memaparkan penyebabnya mulai dari daya serap industri yang tidak seimbang dengan jumlah lulusan SMK, hingga guru yang tidak menguasai bidang ajarnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi pada Tingkat SMK setiap tahunnya mengalami peningkatan, berikut tabel Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Table 1

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2014 s.d. 2018

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2014		2015		2016		2017		2018	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Tidak/belum pernah sekolah	134.040	74.898	124.303	55.554	94.293	59.346	92.331	62.984	42.039	31.774
2	Tidak/belum tamat SD	610.574	389.550	603.194	371.542	557.418	384.069	546.897	404.435	446.812	326.962
3	SD	1.374.822	1.229.652	1.320.392	1.004.961	1.218.954	1.035.731	1.292.234	904.561	967.630	898.145
4	SLTP	1.693.203	1.566.838	1.650.387	1.373.919	1.313.815	1.294.483	1.281.240	1.274.417	1.249.761	1.131.214
5	SLTA Umum/SMU	1.893.509	1.962.786	1.762.411	2.280.029	1.546.699	1.950.626	1.552.894	1.910.829	1.650.636	1.930.320
6	SLTA Kejuruan/SMK	847.365	1.332.521	1.174.366	1.569.690	1.348.327	1.520.549	1.383.022	1.621.402	1.424.428	1.731.743
7	Akademi/Diploma	195.258	193.517	254.312	251.541	249.362	219.736	249.705	242.937	300.845	220.932
8	Universitas	398.298	495.143	565.402	653.586	695.304	567.235	606.939	618.758	789.113	729.601
	Total	7.147.069	7.244.905	7.454.767	7.560.822	7.024.172	7.031.775	7.005.262	7.005.262	6.871.264	7.000.691

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019)

R. Utami Sulistiani, 2020

**STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGENGEMBANGKAN
BURSA KERJA KHUSUS (BKK) STUDI DESKRIPTIF DI SMK NEGERI 2 CIMAHI**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengangguran dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK Agustus 2014 sampai dengan Agustus 2015 meningkat sebanyak 237.169 lulusan, meskipun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sempat mengalami penurunan menjadi 49.141 lulusan, pada Agustus 2016 sampai dengan Agustus 2017 kembali meningkat menjadi 100.853 lulusan, terakhir pada 2017 sampai dengan 2018 meningkat kembali menjadi 110.341 alumni yang masih mengajukan dan belum mendapatkan pekerjaan.

Adanya data bahwa jumlah pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) setiap tahunnya meningkat hal ini harus menjadi perhatian Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Kepala sekolah sebagai *leader* dalam melaksanakan peran dan fungsinya harus memiliki strategi yang tepat untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Kepala Sekolah harus menentukan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, termasuk permasalahan tentang tingginya angka pengangguran yang dihasilkan oleh SMK.

Sesuai dengan upaya yang tercantum dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia salah satunya yaitu kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri, upaya ini dapat menjadi solusi untuk meminimalisir angka pengangguran lulusan SMK, untuk mewujudkan upaya tersebut perlu adanya strategi atau cara yang tepat yang digunakan oleh kepala sekolah untuk mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK).

BKK SMK merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan di SMK, karena BKK menjadi lembaga yang berperan mengoptimalkan penyaluran tamatan SMK dan sumber informasi untuk pencari kerja. Pemberdayaan BKK SMK merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sekolah yaitu sebagai bagian pembinaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan BKK SMK yang telah direncanakan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan SMK.

BKK SMK merupakan salah satu komponen pelaksanaan pendidikan sistem ganda, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan proses pembelajaran yang mengarah kepada kompetensi jika tidak ada pasangan industri/usaha kerja, sebagai lingkungan kerja dimana siswa belajar keahlian dan profesional serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Berdasarkan permasalahan diatas, SMK Negeri 2 Cimahi merupakan sekolah yang sedang berkembang, SMK Negeri 2 Cimahi secara operasional berdiri pada tahun 2007 dan mendapatkan izin operasional Bursa Kerja Khusus (BKK) pada tahun 2011. Dalam menghadapi persaingan revolusi industri 4.0 tentu saja memerlukan strategi yang tepat, dalam perumusan strategi sejatinya tidak akan terlepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin, agar dapat meningkatkan angka keterserapan lulusan SMK Negeri 2 Cimahi di Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mewawancarai Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Industri, dan Koordinator BKK SMK Negeri 2 Cimahi. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan angka serapan lulusan yaitu dengan melaksanakan strategi yang telah disusun oleh sekolah melalui Bursa Kerja Khusus (BKK).

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) bertujuan untuk meningkatkan angka keterserapan lulusan di dunia usaha dan dunia industri, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi sekolah yang sedang mengembangkan BKK dan menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, kemudian penelitian ini berjudul **“Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) Studi Deskriptif di SMK Negeri 2 Cimahi”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, agar permasalahan tidak meluas mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan yang ada pada penulis, maka

penulis membatasi ruang lingkup permasalahan. Adapun yang menjadi fokus penelitian dari penelitian ini yaitu mengenai strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam hal ini perilaku edifikasi kepemimpinan dalam mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang selanjutnya dapat meningkatkan angka keterserapan dan optimisme untuk bekerja lulusan SMK Negeri 2 Cimahi.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menentukan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana Implementasi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri 2 Cimahi?
2. Bagaimana Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 2 Cimahi?
3. Bagaimana Peran Edifikasi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 2 Cimahi?
4. Apa saja faktor penghambat strategi kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 2 Cimahi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas, diantaranya sebagai berikut.

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk meningkatkan angka keterserapan lulusan SMK.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri 2 Cimahi

- b. Menemukan dan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 2 Cimahi
- c. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran edifikasi kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 2 Cimahi, serta
- d. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat strategi kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 2 Cimahi.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian mengenai Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Negeri 2 Cimahi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori khususnya tentang manajemen atau strategi kepemimpinan kepala sekolah.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya dalam topik yang relevan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan konsep strategi kepemimpinan di lembaga pendidikan menengah kejuruan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemimpin dalam menemukan kebijakan yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK).

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Pada bagian ini dikemukakan sistematika penulisan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam karya ilmiah dari mulai bab I sampai dengan bab V dan daftar pustaka. Yang terinci sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Bab ini pada dasarnya menjadi bab perkenalan dan merupakan bagian awal dari skripsi. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
- BAB II** : Kajian Teori. Bab ini berisikan mengenai teori yang relevan dengan masalah penelitian dalam bidang yang sedang diteliti serta dapat dijadikan sebagai landasan analitik dalam analisis temuan.
- BAB III** : Metode Penelitian. Bab ini merupakan penjabaran tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Bahasan mengenai metode penelitian memuat beberapa komponen, yaitu sebagai berikut:
1. Desain Penelitian
 2. Partisipan dan tempat penelitian
 3. Pengumpulan data yang terdiri dari: instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data penelitian
 4. Analisis data, yang terdiri: Reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.
 5. Uji keabsahan data.
- BAB IV** : Temuan dan Pembahasan. Bab ini memuat dua hal utama, yakni:
1. Temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian.
 2. Pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
- BAB V** : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.